

PEMKAB SORSEL CAIRKAN DANA DESA TAHAP PERTAMA Rp97 MILIAR



Sumber: www.bungko.desa.id

Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (Pembab Sorsel), Papua Barat Daya, telah mencairkan dana desa tahap pertama sebesar Rp97 miliar yang bersumber dari APBN untuk 120 kampung di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Pembab Sorsel, Yohan Bodori, menyatakan bahwa dana desa ini akan dibagikan kepada 120 kampung dan langsung disalurkan oleh unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Teminabuan.

Yohan Bodori menjelaskan bahwa sebelum kepala kampung dan bendahara mencairkan dana di bank, mereka harus melengkapi dokumen yang diminta oleh bank dan dinas. "Anggaran tahap pertama untuk setiap kampung berkisar antara Rp300 hingga Rp400 juta,". Pada tahap pertama, Pembab Sorsel mencairkan 40 persen dari total anggaran, diantaranya sebesar Rp42 miliar dialokasikan untuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan ketahanan pangan, dan penanganan stunting. "Sisanya, sebesar Rp22 miliar, digunakan untuk pembangunan reguler," tambahnya. Dia berharap kepala kampung dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai alokasi 40 persen dana tahap pertama ini. "Program fisik yang direncanakan akan dilaksanakan menggunakan anggaran tahap kedua," jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Dance Nauw mengapresiasi kinerja DPMK dalam proses pencairan dana desa dari APBN. "Dana tersebut harus digunakan tepat sasaran sesuai ketentuan, seperti penanganan stunting dan pembayaran BLT," kata Dance Nauw. Ia berharap BLT ini dapat membantu mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sorsel. BLT akan disalurkan untuk dua triwulan, yaitu dari Januari hingga Juni. "BLT menjadi prioritas utama untuk dua triwulan dari Januari sampai Juni, bersama dengan penanganan stunting," kata Yohan Bodori.

Yohan Bodori juga menyebut bahwa program Dana Desa earmark dan non-earmark akan menjadi prioritas selanjutnya oleh pemerintah daerah (pemda) untuk kegiatan bersifat swakelola dan fisik. "Dana Desa earmark dan non-earmark ditujukan untuk berbagai kegiatan, di mana earmark bersifat swakelola dan non-earmark untuk kegiatan fisik. Program earmark bertujuan menunjang kegiatan di bidang perekonomian, salah satunya ketahanan pangan. Oleh karena itu,

pada tahap pertama, kami lebih memprioritaskan program earmark yang mencakup ketahanan pangan untuk menunjang kegiatan perekonomian," jelasnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Yohan Bodori meminta 120 kepala kampung untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar memahami ketentuan dana swakelola tersebut, harus fokus dan sesuai dengan ketentuan yang disampaikan. Kepala kampung harus menjelaskan kepada masyarakat agar mereka tidak bertanya mengapa hanya program earmark yang dilaksanakan, sementara mereka tahu ada program fisik yang direncanakan. Harapannya semoga semua dapat terlaksana.

Sumber Berita:

- 1. Antara Papua Barat, “Pekab Sorsel Cairkan Dana Desa Tahap Pertama Rp97 Miliar”, tanggal 11 Juni 2024;**
- 2. Antara Papua Barat, “Sorong Selatan Prioritaskan Penyaluran BLT Penanganan Stunting,” tanggal 13 Juni 2024.**

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagian C Pendapatan Daerah, menyatakan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, pada Pasal 1:
 - a. Angka 5 menyatakan Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
 - b. Angka 12 menyatakan Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
3. Istilah earmark adalah dana desa yang sudah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat.